



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

**RANCANGAN
PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2017 SKPD
DINAS KEHUTANAN**

PANGKALPINANG

2016

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Untuk melaksanakan pembangunan daerah diperlukan berbagai dokumen perencanaan yang terkait, seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk periode 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 5 (lima) tahun, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk periode 1 (satu) tahun, Rencana Strategis (Renstra) SKPD untuk periode 5 (lima) tahun, serta Rencana Kerja (Renja) SKPD yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu (1) tahun.

Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dibentuk dengan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 52 tahun 2008 tentang Uraian Tugas Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung wajib memiliki dokumen perencanaan Renstra SKPD dan Renja SKPD. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017, maka proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri atas, pertama persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah, dengan agenda kerja pembentukan tim penyusunan Renja SKPD, orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah, penyusunan agenda kerja, dan pengumpulan data dan informasi. Kedua penyusunan Renja Perangkat Daerah yang meliputi tahapan kegiatan perumusan Renja Perangkat Daerah dan tahapan penyajian Renja Perangkat Daerah.

Dalam Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah ini diperlukan keterkaitan dokumen perencanaan lainnya, Rancangan Renja Perangkat Daerah dibuat dengan mengacu pada Renstra SKPD dan RKPD Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang secara keseluruhan harus sinkron dengan dokumen perencanaan RPJP Nasional, RPJD Daerah, RPJMD Daerah, selanjutnya Renja SKPD diimplementasi kedalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD sebagai penjabaran APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017 adalah:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 4 Seri E);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
22. Rencana Strategis (renstra) 2012 -2017 Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017 adalah:

1. Mendukung upaya pencapaian visi dan misi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 serta visi dan misi SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

2. Sebagai dokumen penjabaran Renstra SKPD dan pedoman bagi Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2017;
3. Mewujudkan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan tahun 2016.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rancangan Renja Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017 adalah bab I Pendahuluan meliputi, latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan. Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu meliputi, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, dan review terhadap rancangan awal RKPD. Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, meliputi telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi, tujuan dan sasaran Renja SKPD, program dan kegiatan. Bab IV Penutup.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada Tahun Anggaran 2016 Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan 9 Program Kegiatan dengan jumlah kegiatan sebanyak 56 kegiatan dengan anggaran APBD Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 20.422.963.750,00 dengan komposisi belanja tidak langsung sebesar Rp. 6.210.253.000,00 sedangkan untuk belanja langsung sebesar Rp. 14.212.710.750,00. Realisasi serapan anggaran sampai dengan Triwulan II adalah sebesar Rp. 5.251.884.925,00 (25,72%). Adapun perkiraan realisasi anggaran pada akhir tahun 2016 adalah sebesar Rp. 20.233.659.698,- (99,67%).

Adapun perincian uraian belanja pada Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel.1

**Realisasi Belanja Tidak Langsung Dinas Kehutanan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2016 s.d
Triwulan II**

NO	URAIAN KEGIATAN	APBD	FISIK (%)	REALISASI S.D TW. II		PERKIRAAN REALISASI	
				KEUANGAN (Rp)	%	(Rp)	%
I.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	6.210.253.000,00	48,48	3.010.474.296,00	48,48	6.020.948.948,00	96,95
A	GAJI DAN TUNJANGAN	3.280.777.000,00		1.794.922.796,00	54,71	3.280.777.000,00	100
B	TAMBAHAN PENGHASILAN PNS	2.929.476.000,00		1.215.551.500,00	41,49	2.740.171.948,00	93,54

Tabel.2.
Realisasi Belanja Langsung Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Tahun Anggaran 2016 s.d Triwulan II

NO	URAIAN KEGIATAN	APBD	REALISASI S.D TRIWULAN II		PERKIRAAN REALISASI ANGGARAN		
			KEUANGAN (Rp)	%	(Rp)	%	Fisik
II.	BELANJA LANGSUNG	14.212.710.750,00	3.712.314.721,00	26,12	14.212.710.750,00	100	100
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.355.860.000,00	547.618.612,00	40,38	1.340.660.000,00	98,87	100
1	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30.000.000,00	12.661.630,00	42,20	29.000.000,00	96,67	100
2	Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	114.000.000,00	39.864.064,00	34,96	110.000.000,00	96,49	100
3	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	106.370.000,00	32.685.000,00	30,72	106.370.000,00	100	100
4	Kegiatan Penyediaan Jasa kebersihan Kantor	43.200.000,00	17.520.500,00	40,55	43.000.000,00	99,54	100
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	47.800.000,00	13.245.000,00	27,70	47.000.000,00	98,33	100
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor	78.400.000,00	32.489.500,00	41,44	78.000.000,00	99,46	100
7	Kegiatan Penyediaan Jasa Barang cetakan dan Pengadaan	60.000.000,00	26.375.000,00	43,95	55.000.000,00	91,67	100
8	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.000.000,00	6.025.000,00	20,08	30.000.000,00	100	100
9	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.200.000,00	3.375.000,00	46,87	7.200.000,00	100	100
10	Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.600.000,00	1.017.000,00	6,51	12.000.000,00	76,92	100
11	Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	37.200.000,00	11.329.500,00	30,45	37.000.000,00	99,46	100
12	Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	350.000.000,00	145.750.618,00	41,64	350.000.000,00	100	100

NO	URAIAN KEGIATAN	APBD	REALISASI S.D TRIWULAN II		PERKIRAAN REALISASI ANGGARAN		
			KEUANGAN (Rp)	%	(Rp)	%	Fisik
13	Kegiatan Penyediaan jasa penunjang pengelolaan pelayanan administrasi perkantoran	286.090.000,00	132.000.000,00	46,13	286.090.000,00	100	100
14	Kegiatan koordinasi, konsolidasi ke dalam daerah	150.000.000,00	73.280.800,00	48,85	150.000.000,00	100	100
B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	906.440.000,00	327.097.000,00	36,08	876.000.000,00	96,64	100
1	Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	156.500.000,00	56.250.000,00	35,94	154.000.000,00	98,40	100
2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	173.000.000,00	-	-	170.000.000,00	98,26	100
3	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	155.000.000,00	136.085.000,00	87,79	152.000.000,00	98,06	100
4	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	421.940.000,00	134.762.000,00	31,93	400.000.000,00	94,80	94,80
C	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	55.000.000,00	16.007.000,00	29,10	54.000.000,00	98,18	100
1	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas/Pakaian Kerja/Pakaian Khusus hari-hari tertentu	30.000.000,00	-	-	30.000.000,00	100	100
2	Kegiatan Advokasi Perencanaan Penganggaran Resfonsif Gender Prov. Kep. Babel	25.000.000,00	16.007.000,00	64,02	24.000.000,00	96,00	100
D	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	250.000.000,00	25.055.400,00	10,02	240.000.000,00	96	100
1	Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional	250.000.000,00	25.055.400,00	10,02	240.000.000,00	96,00	100

NO	URAIAN KEGIATAN	APBD	REALISASI S.D TRIWULAN II		PERKIRAAN REALISASI ANGGARAN		
			KEUANGAN (Rp)	%	(Rp)	%	Fisik
E	Program Pemanfaatan Potensi Sumbaer daya Hutan	1.606.575.000 ,00	598.370.141 ,00	37,24	1.551.68 8.650,00	96,58	100
1	Kegiatan Pengembangan industri dan pemasaran hasil hutan	400.000.000,00	384.688.650,00	96,17	384.688.650,00	96,17	100
2	Kegiatan Sosialisasi HTI, HTR dan peredaran hasil hutan	268.500.000,00	64.257.891,00	23,93	268.000.000,00	99,81	100
3	Kegiatan Bimbingan Teknis Penguatan HTR dan Penatausahaan Hasil Hutan	293.250.000,00	14.010.200,00	4,77	293.000.000,00	99,91	100
4	Kegiatan Observasi Lapangan Pembangunan HTR	148.150.000,00	11.601.000,00	7,83	147.000.000,00	99,22	100
5	Kegiatan Pembinaan HTR	237.375.000,00	55.842.600,00	23,52	205.000.000,00	86,36	100
6	Kegiatan Bedah Kinerja IUPHHK	160.000.000,00	9.969.800,00	6,23	155.000.000,00	96,887	100
7	Kegiatan Pengembangan Informasi Komoditi Kehutanan Prioritas Penyuluh Kehutanan dan Pelaku Usaha Melalui Potensi SDH Bangka Belitung	99.300.000,00	58.000.000,00	58,40	99.000.000,00	99,69	100
F	Program Rehabilitasi hutan dan lahan	2.610.180.000 ,00	173.773.600 ,00	6,65	2.520.00 0.000,00	96,54	100
1	Kegiatan Operasional KPHP dan Sarana Penunjang Lainnya	1.282.180.000,00	148.773.600,00	11,60	1.220.000.000,00	95,15	100
2	Kegiatan Peran Serta Masyarakat dalam Rehabilitasi	1.328.000.000,00	25.000.000,00	1,88	1.300.000.000,00	97,89	100

NO	URAIAN KEGIATAN	APBD	REALISASI S.D TRIWULAN II		PERKIRAAN REALISASI ANGGARAN		
			KEUANGAN (Rp)	%	(Rp)	%	Fisik
	Hutan dan Lahan						
G	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	2.699.950.000,00	1.023.690.268,00	37,91	2.695.000.000,00	99,81	100
1	Perlindungan dan pengamanan hutan terpadu di Prov. Kep. Babel	295.150.000,00	119.499.300,00	40,48	295.000.000,00	99,95	100
2	Identifikasi Sebaran Flora dan Fauna Langka (TSL) di Prov. Kep. Babel	296.630.000,00	110.719.800,00	37,32	296.000.000,00	99,78	100
3	Fasilitasi pengamanan hutan swakarsa Prov. Kep. Babel	482.260.000,00	159.616.100,00	33,09	480.000.000,00	99,53	100
4	Pengendalian Kebakaran Hutan dan Sosialisasi Peraturan Bidang Perlindungan Hutan	298.880.000,00	125.824.768,00	42,09	298.800.000,00	99,97	100
5	Operasionalisasi Petugas Polisi Hutan	598.580.000,00	258.948.600,00	43,26	598.000.000,00	99,90	100
6	Kegiatan Penilaian Lomba PKA Wana Lestari	114.780.000,00	47.536.500,00	41,41	114.700.000,00	99,93	100
7	Kegiatan Pembuatan Pos Jaga dan Papan Pengumuman di Hutan Produksi	289.280.000,00	70.145.700,00	24,24	289.000.000,00	99,90	100
8	Kegiatan Pendampingan Penyuluh Kehutanan untuk Perlindungan dan Konservasi SDA	78.580.000,00	62.061.300,00	82,11	78.500.000,00	99,89	100
9	Kegiatan Survey Potensi dan Sebaran Mangrove di Prov. Kep. Babel	245.810.000,00	69.338.200,00	28,20	245.000.000,00	99,67	100

NO	URAIAN KEGIATAN	APBD	REALISASI S.D TRIWULAN II		PERKIRAAN REALISASI ANGGARAN		
			KEUANGAN (Rp)	%	(Rp)	%	Fisik
H	Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan	3.218.240.750 ,00	965.036.300 ,00	29,98	3.102.000. 000,00	96,38	100
1	Kegiatan operasional GIS dan peralatan pendukung pengukuran dan peretakan	189.050.000,00	60.520.800,00	32,01	187.000.000,00	98,91	100
2	Kegiatan Rapat koordinasi perencanaan kehutanan	122.280.000,00	94.061.000,00	76,92	122.000.000,00	99,77	100
3	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan	347.940.000,00	118.242.000,00	33,98	320.000.000,00	91,96	100
4	Kegiatan Rekonsiliasi data dan informasi kehutanan pembangunan kehutanan se-Provinsi Kep. Babel	485.780.000,00	246.549.500,00	50,75	470.000.000,00	96,75	100
5	Kegiatan Sosialisasi Pemenuhan Kewajiban Bagi Pemegang IPPKH	110.600.000,00	83.987.000,00	75,93	110.000.000,00	99,45	100
6	Kegiatan Konsultasi publik rencana pengelolaan dan tata hutan kesatuan pengelolaan hutan (KPH) model	263.900.750,00	7.268.000,00	2,75	257.000.000,00	97,38	100
7	Kegiatan Sosialisasi NSDH Prov. Kep. Babel	260.770.000,00	27.579.000,00	10,57	250.000.000,00	95,86	100
8	Kegiatan Pemantapan Kawasan Hutan	206.205.000,00	104.160.000,00	50,51	200.000.000,00	96,99	100

NO	URAIAN KEGIATAN	APBD	REALISASI S.D TRIWULAN II		PERKIRAAN REALISASI ANGGARAN		
			KEUANGAN (Rp)	%	(Rp)	%	Fisik
9	Kegiatan Penyiapan Penyusunan Kelembagaan dan Fokus Group Discussion Pembangunan KPH di Provinsi Kep. Babel	220.050.000,00	44.316.300,00	20,13	200.000.000,00	90,88	100
10	Kegiatan Revisi RKTP	149.975.000,00	38.390.400,00	25,59	149.000.000,00	99,34	100
11	Kegiatan Koordinasi dan Perencanaan Pemanfaatan Ruang Dalam RTRWP	94.950.000,00	14.785.200,00	15,57	94.000.000,00	98,99	100
12	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Kehutanan Prov. Kep. Babel	223.740.000,00	91.427.100,00	40,86	223.000.000,00	99,66	100
13	Kegiatan Pengembangan Hutan Rakyat	543.000.000,00	33.750.000,00	6,21	520.000.000,00	95,76	100
I	Program Peningkatan dan Daya Dukung DAS berbasis Pemberdayaan Masyarakat	1.178.855.000	70.201.600,00	5,9	1.169.000.000,00	99,16	100
1	Penanaman 1 Milyar Pohon di Prov. Kep. Babel	369.565.000,00	46.751.200,00	12,65	369.000.000,00	99,84	100
2	Kegiatan Rakor dalam Penyusunan Rencana Kerja Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan se-Prov. Kep. Babel	176.890.000,00	3.194.200,00	1,80	176.000.000,00	99,49	100
3	Kegiatan Bimtek Reklamasi dan Rehabilitasi DAS Pada IPPKH dan Stakeholder lainnya	249.200.000,00	5.951.200,00	2,38	244.000.000,00	97,91	100

NO	URAIAN KEGIATAN	APBD	REALISASI S.D TRIWULAN II		PERKIRAAN REALISASI ANGGARAN		
			KEUANGAN (Rp)	%	(Rp)	%	Fisik
4	Penyusunan DED Pengelolaan Ekosistem Mangrove di Pulau Bangka	383.200.000,00	14.305.000,00	3,73	380.000.000,00	99,16	100
JUMLAH		20.422.963.750,00	6.722.789.017,00	32,92	20.233.659.698	99,67	

A. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan.

1. Kegiatan pengembangan industri dan pemasaran hasil hutandilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp400.000.000,-. Realisasi anggaran s.d triwulan II sebesar Rp. 384.688.650,- atau 96,17%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya promosi produk-produk hasil hutan kayu dan bukan kayu dari 7 Kabupaten/Kota.
2. Kegiatan Sosialisasi HTIdan Peredaran Hasil Hutan dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 268.500.000,-. Realisasi anggaran s.d triwulan II sebesar Rp. 64.257.891,- atau 23,93%. Perkiraan akhir tahun akan terealisasi sebesar Rp. 268.000.000,- atau 99,81% Keluaran kegiatan adalah terlaksananyasosialisasi dan pembinaan HTI dan peredaran hasil hutan di Provinsi dan 6 Kabupaten dengan jumlah peserta sebanyak 180 orang terdiri dinas Kabupaten yang membidangi kehutanan dan pemegang izin IUPHHK-HTI.
3. Kegiatan Bimbingan Teknis Penguatan HTR dan Penatausahaan Hasil Hutan dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 293.250.000.,-. Realisasi anggaran s.d triwulan II sebesar Rp. 14.010.200,- atau 4,78%. Perkiraan realisasi pada akhir tahun 2016 sebesar Rp. 293.000.000,- atau 99,91%. Keluaran kegiatan adalah terlatihnya kualitas petugas penatausahaan hasil hutan sebanyak 80 orang.

4. Kegiatan Observasi Lapangan Pembangunan HTR dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 148.150.000,-. Realisasi anggaran s.d triwulan II sebesar Rp. 11.601.000,- atau 7,83%. Perkiraan realisasi kegiatan sebesar Rp. 147.000.000,- atau 99,22%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya observasi lapangan HTR dan PHPL sebanyak 20 orang.
5. Kegiatan Pembinaan Hutan Tanaman Rakyat dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 237.375.000,-. Realisasi anggaran s.d triwulan II sebesar Rp. 55.842.600,- atau 23,52%. Perkiraan realisasi kegiatan s.d triwulan IV adalah sebesar 205.000.000,- atau 86,36%. Keluaran kegiatan adalah meningkatnya pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan hutan melalui program HTR sebanyak 250 orang dari 10 Kelompok Tani Hutan.
6. Kegiatan Bedah Kinerja IUPHHK dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 160.000.000,-. Realisasi anggaran s.d triwulan II sebesar Rp. 9.969.800,- atau 6,23 %. Perkiraan realisasi kegiatan pada triwulan IV adalah sebesar Rp. 155.000.000,- atau 96,88%. Keluaran kegiatan adalah teridentifikasinya kendala dan masalah pembangunan HTI di 7 IUPHHK-HTI.
7. Kegiatan Pengembangan Informasi Komoditi Kehutanan Prioritas Penyuluh Kehutanan dan Pelaku Usaha melalui Potensi SDH Bangka Belitung dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 99.300.000,-. Realisasi anggaran s.d triwulan II sebesar Rp.58.000.000,- atau 58,40 %. Perkiraan realisasi kegiatan s.d triwulan ke III adalah sebesar Rp. 99.000.000,- atau 99,69%. Keluaran kegiatan adalah terbentuknya komoditi kehutanan bersama penyuluh kehutanan di Provinsi Kep. Babel.

B. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

1. Kegiatan Operasionalisasi KPHP dan Sarana Penunjang Lainnya dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.282.180.000,-. Realisasi anggaran s.d triwulan II sebesar Rp.148.773.600,- atau 11,6%. Perkiraan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.220.000.000,- atau 95,15%.Keluaran kegiatan adalah meningkatnya kualitas pengelolaan KPHP sebanyak 2 KPHP di Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur.
2. Kegiatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitungdengan alokasi anggaran sebesar 1.328.000.000,-. Realisasi anggaran s.d triwulan II sebesar Rp. 25.000.000,- atau 1,88%. Perkiraan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.300.000.000,- atau 97,89%. Keluaran kegiatan adalah meningkatnya tutupan lahan sebesar 28 hektar.

C. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.

1. Kegiatan Perlindungan dan Pengamanan Hutan Terpadu di Prov. Kep. Bangka Belitung dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 295.150.000,-. Realisasi anggaran s.d triwulan II sebesar Rp. 119.499.300,- atau 40,48%. Perkiraan realisasi kegiatan pada triwulan IV sebesar 295.000.000,- atau 99,95%. Keluaran kegiatan adalah berkurangnya tindak pidana kehutanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui pengumpulan bahan keterangan di 6 Kabupaten.
2. Kegiatan Identifikasi Sebaran Flora dan Fauna Langka (TSL) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 296.630.000,-. Realisasi anggaran s.d triwulan II sebesar Rp. 110.719.800,- atau 37,32%. Perkiraan realisasi pada triwulan IV sebesar Rp. 296.000.000,- atau 99,78%. Keluaran kegiatan adalah terdata dan tertibnya serta terfasilitasinya penangkar satwa dan tumbuhan endemik di Prov. Kep. Bangka Belitung melalui penangkar yang memiliki izin.

3. Kegiatan Fasilitasi Pengamanan Hutan Swakarsa Provinsi Kep. Bangka Belitung dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 482.260.000,-. Realisasi anggaran s.d triwulan II sebesar Rp159.616.100,- atau 33,10%. Perkiraan realisasi pada triwulan IV adalah sebesar Rp. 480.000.000,- atau 99,53%. Keluaran kegiatan adalah terselenggaranya koordinasi yang baik dengan Pamhut Swakarsa sebanyak 60 orang.
4. Kegiatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Sosialisasi Peraturan Bidang Perlindungan Hutan dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 298.880.000,-. Realisasi anggaran s.d triwulan II sebesar Rp. 125.824.768,- atau 42,10%. Perkiraan realisasi s.d triwulan IV adalah sebesar Rp. 298.800.000,- atau 99,97%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya pertemuan pengendalian kebakaran hutan dan sosialisasi peraturan bidang perlindungan hutan dengan peserta 180 orang.
5. Kegiatan Operasionalisasi Polisi Hutan dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 598.580.000,-. Realisasi anggaran s.d triwulan II sebesar Rp. 258.948.600,- atau 43,26%. Perkiraan capaian realisasi kegiatan pada triwulan IV adalah sebesar Rp. 598.000.000,- atau 99,90%. Keluaran kegiatan adalah terselenggaranya upaya perlindungan hutan dan hasil hutan, melalui operasional polisi hutan di 6 Kabupaten
6. Kegiatan Penilaian Lomba PKA (Penghijauan dan Konservasi Alam) Wana Lestari dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 114.780.000,-. Realisasi anggaran s.d triwulan II sebesar Rp. 47.536.500,- atau 41,41%. Perkiraan realisasi anggaran pada triwulan IV adalah sebesar Rp. 114.700.000,- atau 99,93%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya penilaian lomba PKA Wana Lestari untuk kategori Polisi Hutan dan Kader Konservasi di tingkat provinsi.

7. Kegiatan Pembuatan Pos Jaga dan Papan Pengumuman di Hutan Produksi dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 289.280.000,-. Realisasi anggaran s.d triwulan II sebesar Rp. 70.145.700,- atau 24,24%. Perkiraan realisasi kegiatan pada triwulan IV adalah sebesar Rp. 289.000.000,- atau 99,90%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya pos jaga dan papan pengumuman di kawasan hutan produksi di 6 Kabupaten.
8. Kegiatan Pendampingan Penyuluh Kehutanan untuk Perlindungan dan Konservasi SDA dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 78.580.000,-. Realisasi anggaran s.d triwulan II sebesar Rp. 62.061.300,- atau 78,97%. Perkiraan capaian realisasi pada triwulan III adalah sebesar Rp. 78.500.000,- atau 99,90%. Keluaran kegiatan adalah terbanunnya kesadaran masyarakat dalam perlindungan dan konservasi DAS.
9. Kegiatan survey Potensi dan Sebaran Mangrove di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 245.810.000,-. Realisasi anggaran s.d triwulan II adalah sebesar Rp. 69.338.200,- atau 28,21%. Perkiraan capaian realisasi s.d triwulan IV adalah sebesar Rp. 245.000.000,- atau 99,67%. Kerluaran kegiatan adalah tersusunnya buku laporan perlindungan mangrove di Kabupaten Bangka Barat.

D. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan.

1. Kegiatan Operasional GIS dan Peralatan Pendukung Pengukuran dan Perpetaan dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 189.050.000,-. Realisasi anggaran sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 60.520.800,- atau 32,03%. Perkiraan realisasi pada triwulan IV adalah sebesar Rp. 187.000.000,- atau 98,91%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya operasionalisasi peralatan GIS dan alat operasional

pengukuran dan perpetaan melalui pelayanan kepada masyarakat untuk pengukuran dan perpetaan.

2. Kegiatan Rapat Koordinasi Perencanaan Kehutanan dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 122.280.000,-. Realisasi anggaran s.d triwulan II sebesar Rp. 94.061.000,- atau 76,92%. Perkiraan realisasi pada triwulan III adalah sebesar Rp. 122.000.000,- atau 99,77%. Keluaran kegiatan adalah tersusunnya dokumen renja SKPD.
3. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 347.940.000,-. Realisasi anggaran s.d triwulan II adalah sebesar Rp.118.242.000,- atau 33,98%. Perkiraan realisasi pada triwulan IV adalah sebesar Rp. 320.000.000,- atau 91,96% Keluaran kegiatan adalah terlaksananya evaluasi terhadap pemenuhan kewajiban izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) sebanyak 6 pemegang izin IPPKH (Yayasan Panca Bhakti, PT. Timah (persero) Tbk, PT. Mitrayasa Sarana Informasi, PT. Yudian Sejahtera, PT. Stelindo Wahana Prakasa, dan PT. Gunung Sawit Bina Lestari) di 4 Kabupaten (Kab. Belitung, Belitung Timur, Bangka dan Bangka Barat).
4. Kegiatan Rekonsiliasi Data dan Informasi Pembangunan Kehutanan se-Provinsi Kep. Bangka Belitung dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 485.780.000,-. Realisasi anggaran s.d triwulan II sebesar Rp. 246.549.500,- atau 50,75%. Perkiraan realisasi pada triwulan IV adalah sebesar Rp. 470.000.000,- atau 96,75%. Keluaran kegiatan adalah sinkronisasi data dan informasi pembangunan kehutanan se-Prov. Kep. Bangka Belitung, terupdatenya data statistik kehutanan, terciptanya koordinasi yang baik dengan Kabupaten/Kota dan stakeholder sebanyak 1 dokumen.
5. Kegiatan Sosialisasi Pemenuhan Kewajiban bagi pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 110.600.000,-. Realisasi anggaran s.d triwulan

Ilsebesar Rp.83.987.000,- atau 79,23%. Perkiraan realisasi s.d triwulan III adalah sebesar 110.000.000,- atau 99,45%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya sosialisasi dan pemutakhiran basis data IPPKH di wilayah Prov. Kep. Bangka Belitung dengan peserta 40 orang berasal dari pemegang izin IPPKH, UPT Kementerian LHK, Dinas Kabupaten dan Provinsi.

6. Kegiatan Konsultasi Publik Rencana Pengelolaan dan Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Model dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 263.900.750,-. Realisasi anggaran s.d triwulan II sebesar Rp. 7.268.000,- atau 2,75%. Perkiraan realisasi s.d triwulan IV adalah sebesar Rp. 257.000.000,- atau 97,38%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya sosialisasi rencana pengelolaan dan tata hutan KPH sebanyak 80 peserta (2 KPH).
7. Kegiatan Sosialisasi Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) Provinsi ke Pengelola dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 260.770.000,-. Realisasi anggaran s.d triwulan II sebesar Rp. 27.579.000,- atau 10,58%. Perkiraan realisasi pada triwulan IV adalah sebesar Rp. 250.000.000,- atau 95,58%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya sosialisasi NSDH dengan peserta sebanyak 40 orang dengan peserta dari 6 Kabupaten dan tersedianya dokumen NSDH.
8. Kegiatan Pemantapan Kawasan Hutan dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 206.205.000,-. Realisasi anggaran s.d triwulan II sebesar Rp. 104.160.000,- atau 50,51%. Perkiraan realisasi s.d triwulan III adalah sebesar Rp. 200.000.000,- atau 96,99%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya orientasi dan inventarisasi batas kawasan hutan sepanjang 90 km trayek batas luar kawasan hutan.
9. Kegiatan Penyiapan Penyusunan Kelembagaan dan FGD Pembangunan KPH dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 220.050.000,-. Realisasi anggaran s.d triwulan II sebesar Rp. 44.316.300,- atau 50,51%. Perkiraan realisasi s.d triwulan III adalah

sebesar Rp. 200.000.000,- atau 96,99%. Keluaran kegiatan adalah konsep revisi Pergub penyusunan kelembagaan KPH.

10. Kegiatan Revisi Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 149.975.000,-. Realisasi anggaran s.d triwulan II sebesar Rp. 38.390.400,- atau 25,60%. Perkiraan realisasi pada triwulan IV sebesar Rp. 149.000.0000,- atau 99,34%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya dokumen revisi RKTP Kep. Bangka Belitung.
11. Kegiatan Koordinasi dan Perencanaan Pemanfaatan Ruang dalam RTWP dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 94.950.000,-. Realisasi anggaran s.d triwulan II sebesar Rp. 14.785.200,- atau 15,57%. Perkiraan realisasi pada triwulan IV sebesar Rp. 94.000.000,- atau 98,99%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya koordinasi perencanaan pemanfaatan ruang (substansi kehutanan) di 4 Kabupaten di Pulau Bangka.
12. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Kehutanan Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 223.740.000,-. Realisasi anggaran s.d triwulan II sebesar Rp. 91.427.100,- atau 40,86%. Perkiraan realisasi pada triwulan IV sebesar Rp. 223.000.000,- atau 99,66%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pembangunan kehutanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
13. Kegiatan Pengembangan Hutan Rakyat dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 543.000.000,-. Realisasi anggaran s.d triwulan II sebesar Rp. 33.750.000,- atau 6,21%. Perkiraan realisasi pada triwulan IV sebesar Rp. 520.000.000,- atau 95,76%. Keluaran kegiatan adalah meningkatnya kualitas tutupan lahan melalui areal model pengembangan Hutan Rakyat di 6 Kabupaten.

E. Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

1. Kegiatan Penanaman Satu Milyar Pohon di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 369.565.000,-. Realisasi anggaran s.d triwulan II sebesar Rp. 46.751.200,- atau 12,65%. Perkiraan realisasi pada triwulan IV sebesar Rp. 369.000.000,- atau 99,84%. Keluaran kegiatan adalah tercapainya jumlah penanaman 10 juta pohon di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Kegiatan Rapat Koordinasi Dalam Penyusunan Rencana Kerja Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 176.890.000,-. Realisasi anggaran s.d triwulan II sebesar Rp. 3.194.200,- atau 1,77%. Perkiraan realisasi pada triwulan IV sebesar Rp. 176.000.000,- atau 99,49%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya penyusunan rencana kerja Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan.
3. Kegiatan Bimtek Reklamasi dan Rehabilitasi DAS pada IPPKH dan Stakeholder Lainnya dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 249.200.000,-. Realisasi anggaran s.d triwulan II sebesar Rp. 5.951.200,- atau 2,39%. Perkiraan realisasi pada triwulan IV sebesar Rp. 244.000.000,- atau 97,91%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya dokumen reklamasi dan terlaksananya bimtek reklamasi dan rehabilitasi DAS sebanyak 60 peserta.
4. Kegiatan Penyusunan DED Pengelolaan Ekosistem Mangrove di Pulau Bangka dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 383.200.000,-. Realisasi anggaran s.d triwulan II sebesar Rp. 14.305.000,- atau 37,33%. Perkiraan realisasi pada triwulan IV sebesar Rp. 380.000.000,- atau 99,16%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya dokumen DED Pengelolaan Ekosistem Mangrove di Kabupaten Bangka Tengah.

Sedangkan prakiraan pencapaian untuk pelaksanaan Tahun Anggaran 2016 sesuai dengan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2012 – 2017 dan dapat dilihat pada tabel 3 (tiga), secara umum pada tahun 2016, Dinas Kehutanan melaksanakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang kehutanan, dengan menyelenggarakan 9 (sembilan) program dan 56 (lima puluh enam) kegiatan antara lain: Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan, Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan, Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan, Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan Masyarakat. Dibawah ini diuraikan secara terperinci urusan yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2012-2017, maka arah kebijakan dan strategi yang akan ditempuh oleh Dinas Kehutanan antara lain :

- a. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pembangunan kehutanan;
- b. Pembentukan unit – unit Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- c. Inventarisasi dan identifikasi potensi sumber daya hutan terutama data spasial berbasis teknologi *Geographic Information System* (GIS);
- d. Pengumpulan data dan informasi potensi eko wisata dan jasa lingkungan di dalam kawasan hutan;
- e. Pengoptimalan rehabilitasi hutan dan lahan dan optimalisasi peran dan fungsi kelompok kerja pengendalian rehabilitasi hutan/lahan;
- f. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik terhadap perizinan di bidang usaha pada hutan produksi dan hutan lindung;
- g. Optimalisasi terhadap perizinan industri hasil hutan baik kayu maupun non kayu termasuk upaya pembinaan, pengawasan dan penertiban pelaksanaan peredarannya.

Tabel 3
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Perkiraan Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2016
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

PD: Dinas Kehutanan Provinsi Kep. Bangka Belitung

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD tahun 2017)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan tahun 2014	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2016)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD sampai dengan tahun Berjalan	
				Target Renja SKPD Tahun 2015	Realisasi Renja SKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
Urusan wajib									
Bidang urusan kehutanan									
Program administrasi perkantoran									

- Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan surat menyurat yang terkirim, setiap tahun	97	73	12	12	100%	12	97	100%
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan ketersediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik setiap tahun	98	74	12	12	100%	12	98	100%
- Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah tenaga jasa administrasi keuangan	56	42	7	7	100%	7	56	100%
- Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah petugas kebersihan kantor, 4 orang per tahun	36	28	4	4	100%	4	36	100%

- Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah bulan peralatan kerja kantor yang diperbaiki setiap tahun	65	49	7	7	100%	7	63	96,9%
- Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK)	Jumlah bulan ketersediaan Alat Tulis Kantor (ATK) setiap tahun (12 bulan)	96	72	12	12	100%	12	96	100%
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan barang cetakan dan penggandaan setiap tahun	96	70	12	12	100%	12	94	97,9%
- Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bulan ketersediaan bahan logistik kantor	24	0	12	12	100%	12	24	100%

- Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman tamu dan rapat pegawai setiap tahun	96	70	12	12	100%	12	94	97,9%
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah bulan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah setiap tahun	90	45	12	12	100%	14	71	78,9%
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur									
- Pengadaan Komputer	Jumlah Komputer	26	1	6	6	100 %	6	13	50%
- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah bulan terpeliharanya gedung kantor	96	60	12	12	100%	12	84	87,5%

	setiap tahun								
- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah mobil dinas dan kendaraan bermotor yang dipelihara	96	60	12	12	100%	12	84	87,5%
Program peningkatan Disiplin Aparatur									
- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya	346	58	112	112	100%	58	228	65,6%
Urusan Pilihan									
Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan									

- Pengembangan industri dan pemasaran hasil hutan	Prosentase peningkatan pemanfaatan produksi hasil hutan	25 %	5 %	10 %	10 %	100 %	5 %	25 %	80%
- Pengembangan Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan	Prosentase penerimaan PNBP	10 %	2 %	2 %	2 %	100%	6 %	10 %	100 %
- Bedah kinerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu									
- Sosialisasi Pemenuhan Kewajiban Bagi Pemegang IPPKH									
- Sosialisasi HTI dan Peredaran Hasil Hutan	Jumlah luas areal pencadangan izin pemanfaatan hutan tanaman	880 Ha	220 Ha	220 Ha	220 Ha	100 %	200 Ha	640 Ha	72,72%
- Bimtek Penguatan HTR dan Penatausahaan Hasil Hutan									

- Observasi lapangan pembangunan HTR									
- Pembinaan Hutan Tanaman Rakyat									
- Pengembangan Hutan Rakyat									
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan									
- Operasionalisasi KPH dan Sarana Penunjang Lainnya	Meningkatnya pengelolaan KPHP	6KPHP	2	3	3	100%	2	7	116,7%
- Konsultasi Publik Rencana Pengelolaan dan Tata Hutan KPH Model									
- Penyiapan Penyusunan Kelembagaan dan FGD Pembangunan KPH di Prov. Kerp. Babel									

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan									
<ul style="list-style-type: none"> - Operasional Petugas Polisi Hutan - Fasilitas Pengamanan Hutan Swakarsa Prov. Kep. Babel - Pengendalian Kebakaran Hutan dan Sosialisasi Peraturan Bidang Perlindungan Hutan - Perlindungan dan Pengamanan Hutan Terpadu di Prov. Kep. Babel - Penilaian Lomba PKA Wana Lestari 	Prosentase penanganan tindak pidana hutan	80 %	20 %	20 %	20 %	100%	20 %	60 %	75%

<ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan Pos Jaga dan Papan Pengumuman di Hutan Produksi - Pendampingan Penyuluh Kehutanan untuk Perlindungan dan Konservasi SDA - Survey Potensi Sebaran Mangrove di Prov. Kep. Babel 									
- Identifikasi Sebaran Flora dan Fauna Langka di Prov. Kep. Babel	Data base flora fauna dan habitatnya	5 (Jenis)	1	1	1	100%	2	4	80 %
- Inventarisasi Pemanfaatan Jasa Lingkungan Dalam Kawasan Hutan	Meningkatnya jumlah izin pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam	9	2	2	4	50 %	2	8	88,88%

- Pembuatan DED Ekosistem Mangrove									
Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan									
- Operasional Peralatan GIS dan peralatan pendukung pengukuran dan perpetaan	Prosentase pelayanan publik tentang perpetaan kawasan hutan	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %
- Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kehutanan	Dokumen perencanaan tahunan	4	1	1	1	100%	1	3	75%
- Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan	Terlaksananya monitoring dan evaluasi	4 Dokumen	1	1	1	100%	1	3	75%

- Monev. Pembangunan Kehutanan Prov. Kep. Babel	terhadap penggunaan kawasan hutan								
- Rekonsiliasi data dan Informasi Pembangunan Kehutanan se-Provinsi Kep. Babel	Data dan informasi statistik kehutanan	4 Dokumen	1	1	1	100 %	1	3	75 %
- Sosialisasi neraca sumber daya hutan (NSDH) provinsi kepulauan bangka belitung									
- Revisi Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi	Dokumen RKTP	2	0	1	1	100%	1	2	100%
- Koordinasi dan Perencanaan	Terlaksananya koordinasi perencanaan	6 Kabupaten	0	2	2	100%	4	6	100%

Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Provinsi	pemanfaatan ruang (substansi kehutanan)								
- Pemantapan Keberadaan Fungsi Kawasan Hutan	Jumlah trayek batas luar kawasan hutan	450 km	175 km	100 km	100 km	100 %	90 km	365 km	81,1 %
- Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan Masyarakat									
- Penanaman satu milyar pohon di provinsi kepulauan bangka belitung	Menurunnya luas lahan kritis di Bangka Belitung	400 Ha	100 Ha	100 Ha	100 Ha	100 %	100 Ha	300 Ha	75 %
- Bimbingan teknis reklamasi dan									

rehabilitasi DAS pada IPPKH dan stakeholder lainnya se provinsi kepulauan bangka belitung									
- Pembinaan dan Pemeliharaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Kelekak Kelukoi serta Hutan Desa									
- Rapat koordinasi dalam penyusunan rencana kerja hutan desa dan hutan kemasyarakatan se-provinsi kepulauan bangka belitung	Dokumen	7	0	1	1	100%	1	2	28,6%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Untuk mencapai pelayanan yang optimal, pemerintahan daerah selaku penyelenggara urusan pemerintahan harus dapat memproses dan melaksanakan hak dan kewajiban berdasarkan asas-asas pemerintahan yang baik (*Good Governance*) sesuai dengan asas umum penyelenggaraan negara.

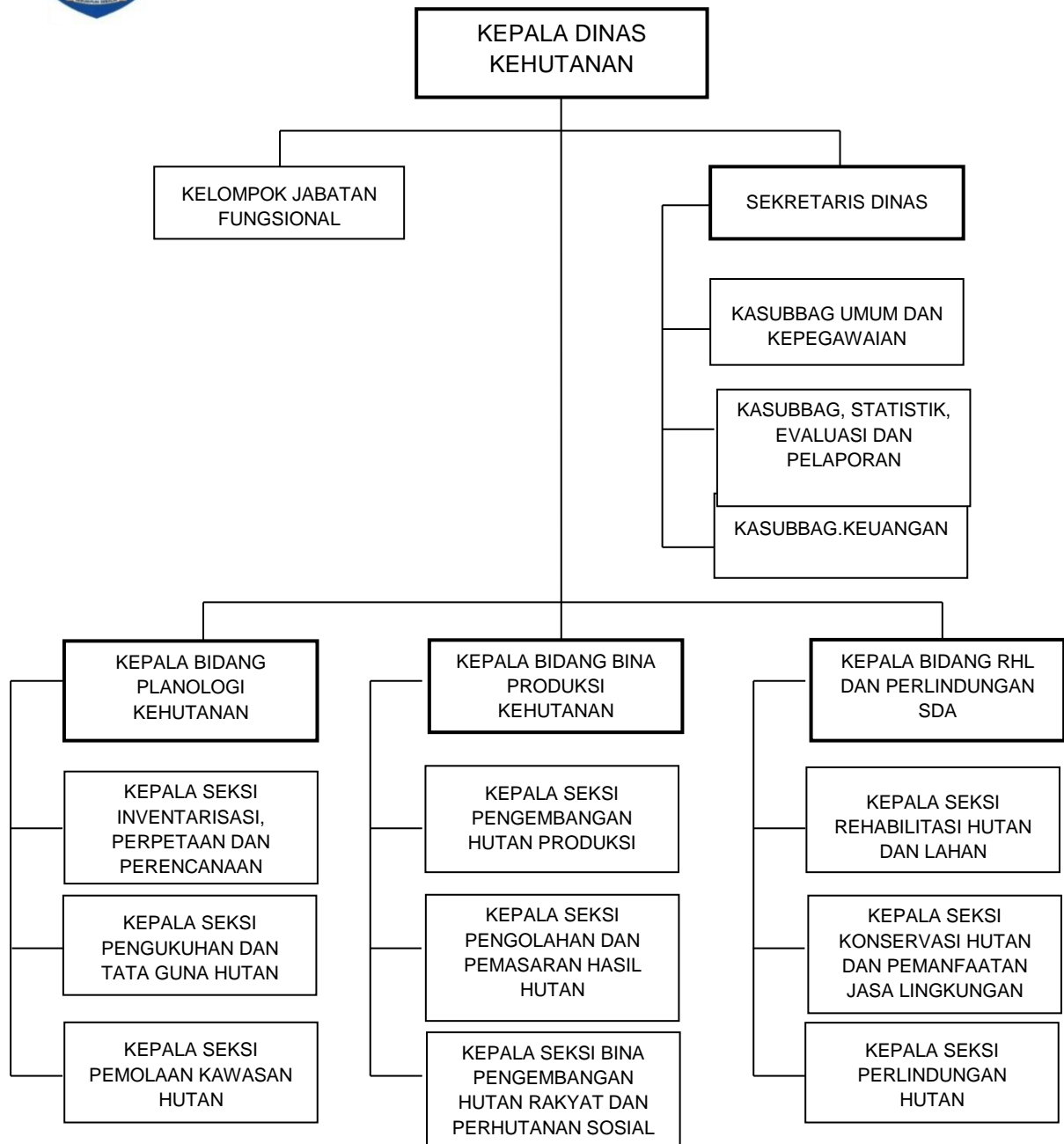
2.2.1. Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai fungsi sebagai penyelenggara kehutanan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari:

- a. 1 (satu) Kepala Dinas yang setara dengan jabatan eselon IIa.
- b. 1 (satu) jabatan Sekretaris Dinas yang setara dengan jabatan eselon IIIa.
- c. 3 (Tiga) jabatan Kepala Bidang yang setara dengan jabatan eselon IIIa.
- d. 3 (tiga) jabatan Kepala Sub Bagian yang berada di Sekretariat yang setara dengan jabatan eselon IVa.
- e. 9 (sembilan) jabatan Kepala Seksi yang berada di Bidang yang setara dengan jabatan eselon IVa.

Dibawah ini adalah struktur organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung:

STRUKTUR ORGANISASI TATA KERJA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didukung sebanyak 80 pegawai, dengan status kepegawaian 52 PNS, 12 orang tenaga honorer dan 10 orang tenaga honorer Pengaman Hutan. Kualifikasi pendidikan pegawai terdiri dari S2 sebanyak 6 orang, S1 sebanyak 35 orang, D3 sebanyak 6 orang dan SMA sebanyak 11 orang. Sedangkan honorer terdiri dari S1 sebanyak 4 orang dan SLTA sebanyak 18 orang. Berdasarkan eselonering yang menduduki jabatan eselon II sebanyak 1 orang, eselon III sebanyak 4 orang dan eselon IV sebanyak 12 orang.

Tabel 4

Klasifikasi Pegawai di Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Doktoral/ S3	-	-	-
2	Pasca Sarjana/ S2	4	2	6
3	Sarjana / S1	23	12	35
4	Diploma-IV	-	-	-
5	Diploma-III	2	4	6
6	Diploma-I/ II	-	-	-
7	SLTA	7	4	11
8	SLTP	-	-	-
9	SD	-	-	-

Tabel 5

Klasifikasi Pegawai di Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Berdasarkan Eselonering

No	Tingkat Eselon	Jumlah Pegawai		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	II A	1	-	1
	II B	-	-	-
	II C	-	-	-
	II D	-	-	-
2	III A	2	2	4
	III B	-	-	-
	III C	-	-	-
	III D	-	-	-
3	IV A	8	4	12
	IV B	-	-	-
	IV C	-	-	-
7	Non Eselon	25	14	39
8	Fungsional	1	1	2
	Jumlah	37	21	58

Dilihat dari tabel diatas bahwa pegawai pada Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah terlihat beragam dari segi golongan maupun pendidikan.

Tugas Pokok dan Fungsi Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

- 1). Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi umum, perlengkapan dan rumah tangga, administrasi keuangan dan pembinaan kepegawaian, perencanaan anggaran, data dan statistik kepada seluruh satuan kerja di lingkungan Dinas Kehutanan.

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Sub bagian Umum dan Kepegawaiaian mempunyai tugas melaksanakan Administrasi Umum Kepegawaiaian, perlengkapan dan kepastakaan.

- b. Sub Bagian Keuangan;

Sub Bagian Keuangan melaksanakan penyusunan perencanaan anggaran dan belanja, urusan pembukuan dan menyusun pertanggungjawaban serta urusan perbendaharaan anggaran belanja Dinas.

- c. Sub Bagian Statistik, Evaluasi dan Pelaporan.

Sub Bagian Statistik, Evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistic perkembangan dan hasil-hasil pelaksanaan tugas di bidang kehutanan

- 2). Bidang Planologi Kehutanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Kehutanan di daerah yang berkaitan dengan penyusunan rencana makro kehutanan dan pemantapan kawasan hutan sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi.

Bidang Planologi Kehutanan terdiri dari :

- a. Seksi inventarisasi, Perpetaan dan Perencanaan;

Seksi Inventarisasi, Perpetaan dan Perencanaan mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan kebijakan teknis tentang pelayanan umum, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang inventarisasi, perpetaan dan perencanaan kehutanan lingkup Provinsi;

- b. Seksi Pengukuhan dan Tata Guna Hutan;

Seksi Pengukuhan dan Tata Guna Hutan mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan kebijakan teknis tentang pelayanan umum,

perencanaan, pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang pengukuhan dan pemanfaatan kawasan hutan lingkup Provinsi

c. Seksi Pemolaan Kawasan Hutan;

Seksi Pemolaan Kawasan Hutan mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan kebijakan teknis tentang pelayanan umum, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang pemolaan kawasan hutan lingkup Provinsi.

3). Bidang Bina Produksi Kehutanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas-tugas Dinas Kehutanan di daerah yang berkaitan dengan pembinaan produksi kehutanan lingkup Provinsi.

Bidang Produksi Kehutanan terdiri dari :

a. Seksi Pengembangan Hutan Produksi;

Seksi Pengembangan Hutan Produksi mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan kebijakan teknis tentang pelayanan umum, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang pengembangan hutan produksi baik hutan alam maupun hutan tanaman lingkup Provinsi

b. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan

Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan kebijakan teknis tentang pelayanan umum, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang pengolahan, peredaran, pemasaran dan iuran hasil hutan lingkup Provinsi.

c. Seksi Bina Pengembangan Hutan Rakyat dan Perhutanan Sosial;

Seksi Bina Pengembangan Hutan Rakyat dan Perhutanan Sosial mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan kebijakan teknis tentang pelayanan umum, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang pengembangan hutan rakyat dan perhutanan sosial lingkup Provinsi.

4). Bidang Rehabilitasi Hutan, Lahan dan Perlindungan Sumberdaya Alam mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas-tugas Dinas Kehutanan di daerah yang berkaitan dengan rehabilitasi hutan dan lahan serta perlindungan Sumberdaya alam khususnya hutan lingkup Provinsi.

Bidang Rehabilitasi Hutan-lahan dan Perlindungan Sumberdaya Alam terdiri dari :

a. Seksi Konservasi Hutan dan Pemanfaatan Jasa Lingkungan

Seksi Konservasi Hutan dan Pemanfaatan Jasa lingkungan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis tentang pelayanan umum, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang konservasi sumberdaya hutan serta pemanfaatan jasa lingkungan termasuk wisata alam lingkup Provinsi.

b. Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan;

Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis tentang pelayanan umum, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang rehabilitasi hutan dan lahan serta sinkronisasi dengan kegiatan terkait lingkup Provinsi.

c. Seksi Perlindungan Hutan;

Seksi Perlindungan Hutan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis tentang pelayanan umum, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang perlindungan hutan termasuk penanggulangan kebakaran hutan/lahan lingkup Provinsi.

5). Kelompok Jabatan Fungsional

a. Polisi Kehutanan;

b. Penyuluh Kehutanan.

Kelompok jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Meskipun telah dicapai kemajuan di bidang kehutanan, tetap saja masih ada permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Permasalahan yang dihadapi Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

a. Kurang proporsionalnya penempatan pegawai terkait dengan jumlah dan kompetensi yang dimiliki.

- b. Tumpang tindihnya tugas antar lingkup sub bagian pada Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- c. Terbatasnya sarana dan prasarana aparatur, terutama Gedung Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang kurang representatif.
- d. Kurangnya koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan antara Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- e. Masih minimnya anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sehingga pelaksanaan kegiatan di bidang pembangunan kehutanan belum dapat dilaksanakan secara optimal;
- f. Kurangnya Sumber Daya Manusia, baik secara kualitas maupun kuantitas sehingga beberapa tupoksi belum dapat berjalan secara optimal.

Sedangkan permasalahan teknis yang dihadapi Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut :

- a. Hampir semua kawasan hutan telah dilakukan tata batas namun adanya indikasi ketidakselarasan antara dokumen dengan batas lapangan;
- b. Belum semua kawasan hutan dikelola dalam unit-unit pengelolaan;
- c. Data informasi kehutanan yang belum terintegrasi sesuai dengan kebutuhan para pihak;
- d. Kapasitas kelembagaan kehutanan yang masih terbatas (kualitas dan kuantitas), baik SDM , sarana penunjang maupun tatanan sistem.
- e. Proses review RTRWP 2009 – 2012 belum mengakomodir perencanaan pembangunan sektor terkait lainnya dan belum tuntas/DPCLS;
- f. Rendahnya efisiensi produksi/penerapan iptek industri HH dan belum optimal pengembangan/pemberdayaan HHBK oleh masyarakat;
- g. Pengembangan investasi dibidang kehutanan terhambat pada kondisi yang kurang kondusif;
- h. Luasnya lahan kritis (hingga 45-50%) baik di dalam maupun luar KH sehingga diperlukan cost tinggi dalam upaya rehabilitasi (dan reklamasi) berdampak pada menurunnya daya dukung lingkungan;

- i. Minimnya personil pengamanan dan perlindungan hutan (Polhut, PPNS, Penyuluh) beserta sarpras penunjang;
- j. Tingginya gangguan keamanan terhadap kawasan hutan dan hasil-hasil hutan;
- k. Belum optimalnya pelaksanaan litbang potensi KH dan belum berkembangnya potensi pemanfaatan jasa lingkungan dari KH (air, *carbon*, wisata dll) yang dapat memberi manfaat ganda baik bagi kelestarian lingkungan maupun kesejahteraan masyarakat;

Permasalahan-permasalahan yang ada pada Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi tantangan yang harus diselesaikan guna pencapaian penyelenggaraan kehutanan secara optimal sehingga didapatkan pengaruh semakin membaiknya kualitas sumber daya hutan dan meningkatnya manfaat hutan. Indikator membaiknya kualitas sumber daya hutan adalah menurunnya deforestasi dan degradasi hutan serta terselenggaranya upaya – upaya rehabilitasi, sedangkan indikator meningkatnya manfaat hutan ditandai dengan meningkatnya kontribusi hutan terhadap perekonomian nasional berupa Pendapatan Domestik Bruto (PDB), penyediaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha masyarakat, serta meningkatnya kualitas lingkungan hidup termasuk dalam konteks mitigasi dan adaptasi perubahan iklim global.

Tantangan yang perlu diantisipasi oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pencapaian program prioritas adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan tata batas dan penyusunan neraca sumber daya hutan, karena terjadi beberapa perubahan kewenangan dari Provinsi (Dinas Kehutanan) ke Pemerintah (Kementerian Kehutanan);
2. Pengembangan dan pemanfaatan potensi jasa lingkungan dan wisata alam, karena wisata alam dan jasa lingkungan belum dijadikan aset dalam *eco tourism* sebagai pendukung destinasi wisata;
3. Rehabilitasi hutan dan lahan, dikarenakan besarnya tekanan terhadap hutan untuk kegiatan penambangan tidak diikuti dengan penegakan hukum dan penyediaan anggaran yang memadai;

4. Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat dan Perhutanan Sosial, faktor penyebab adalah proses perijinan dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota dan koordinasi dengan Kementerian Kehutanan, Provinsi berperan dalam fasilitasi .

Adapun isu-isu strategis dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2015 antara lain sebagai berikut :

1. Peningkatan kapasitas dan sumber daya manusia serta kelembagaan penyelenggara kehutanan yang profesional;
2. Pemantapan keberadaan dan fungsi kawasan hutan;
3. Penyelenggaraan perlindungan, pengamanan hutan dan konservasi sumber daya alam;
4. Peningkatan upaya reboisasi, rehabilitasi hutan dan lahan serta reklamasi hutan;
5. Peningkatan pengelolaan hutan produksi lestari.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD tahun 2017 dengan hasil analisis kebutuhan program dan kegiatan tahun 2016. Proses pembandingan ini dilakukan agar Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki informasi terhadap perencanaan yang telah dilakukan dan bahan evaluasi terhadap pelaksanaan renstra SKPD.

Pada tabel 4 (empat) review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2017 dapat dilihat bahwa usulan program yang direncanakan sebanyak 9 (sembilan) program dengan 52(lima puluh dua) kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 11.342.628.000,00- (sebelas milyar tiga ratus empat puluh duajuta enamratus dua puluh delapan ribu rupiah). Hasil analisis kebutuhan yang merupakan realisasi program dan kegiatan tahun 2016 terdiri atas 9(sembilan) program dengan 56 (lima puluh enam) kegiatan senilai Rp. 14.212.710.750,00,-(empat belas milyar dua ratus dua belas juta tujuh ratus sepuluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Tabel 6
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2017
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

SKPD: Dinas Kehutanan

Nomor	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				3.545.560.000	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				3.545.560.000	
	- Penyediaan jasa surat menyurat	Pangkalpinang	Terlaksananya Pelayanan dan Pengiriman Surat	12 Bulan	30.000.000	- Penyediaan jasa surat menyurat	Pangkalpinang	Terlaksananya Pelayanan dan Pengiriman Surat	12 Bulan	30.000.000	

			Menyurat, Perangko, Materai dan Benda Pos					Menyurat, Perangko, Materai dan Benda Pos			
	- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pangkalpinang	Terciptanya komunikasi sumber daya air dan listrik	12 Bulan	114.000.000	- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pangkalpinang	Terciptanya komunikasi sumber daya air dan listrik	12 Bulan	114.000.000	
	- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pangkalpinang	Terlaksananya Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan SKPD	12 Bulan	149.430.000	- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pangkalpinang	Terlaksananya Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan SKPD	12 Bulan	149.430.000	
	- Penyediaan jasa kebersihan	Pangkalpinang	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	40.000.000	- Penyediaan jasa kebersihan kantor	Pangkalpinang	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	40.000.000	

	kantor										
	- Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Pangkalpinang	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	47.800.000	- Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Pangkalpinang	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	47.800.000	
	- Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK)	Pangkalpinang	Tersedianya ATK	12 Bulan	90.000.000	- Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK)	Pangkalpinang	Tersedianya ATK	12 Bulan	90.000.000	
	- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Pangkalpinang	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	60.000.000	- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Pangkalpinang	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	60.000.000	
	- Penyediaan komponen instalasi listrik/pener	Pangkalpinang	Terpenuhi Komponen Instalasi Listrik	12 Bulan	30.000.000	- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	Pangkalpinang	Terpenuhi Komponen Instalasi Listrik	12 Bulan	30.000.000	

	angan bangunan kantor					kantor					
	- Penyediaa n bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	pangkalpinan g	Terpenuhi Bahan Bacaan dan Peraturan Perundan gan	12 Bulan	7.200.000	- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Pangkal pinang	Terpenuhi Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang an	12 Bula n	7.200.000	
	- Penyediaa n makanan dan minuman	Pangkalpina ng	Tersedian ya makan dan minum rapat,mak anan dan minuman tamu	12 Bulan	34.700.000	- Penyediaan makanan dan minuman	Pangkal pinang	Tersediany a makan dan minum rapat,maka nan dan minuman tamu	12 Bula n	34.700.000	
	- Penyediaa n bahan logistik kantor	Pangkalpina ng	Tersedian ya logistik untuk kantor	12 Bulan	12.840.000	- Penyediaan bahan logistik kantor	Pangkal pinang	Tersediany a logistik untuk kantor	12 Bula n	12.840.000	
	- Rapat-	Pangkalpina	Terlaksan	12Bulan	350.000.000	- Rapat-rapat	Pangkal	Terlaksana	12B	350.000.000	

	rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	ng	anya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah			koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	pinang	nya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	ulan		
	- Koordinasi, konsolidasi ke dalam daerah	7 Kab/Kota	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 Bulan	150.000.000	- Koordinasi, konsolidasi ke dalam daerah	7 Kab/Kota	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 Bulan	150.000.000	
	- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi	Pangkalpinang	Terlaksananya pelayanan penunjang dan pengelolaan administrasi	12 Bulan	286.090.000	- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pangkalpinang	Terlaksananya pelayanan penunjang dan pengelolaan administrasi	12 Bulan	286.090.000	

	Perkantoran		asi perkantoran					perkantoran			
	- Peningkatan Fungsi Pelayanan Kantor Cabang Dinas Kabupaten Kehutanan di Bangka Tengah dan Bangka Selatan	Kab. Bangka Tengah dan Bangka Selatan	Terlaksananya Operasional Kantor Cabang Dinas	12 Bulan	160.640.000	- Peningkatan Fungsi Pelayanan Kantor Cabang Dinas Kabupaten Kehutanan di Bangka Tengah dan Bangka Selatan	Kab. Bangka Tengah dan Bangka Selatan	Terlaksananya Operasional Kantor Cabang Dinas	12 Bulan	160.640.000	
	- Peningkatan Fungsi Pelayanan Kantor Cabang Dinas Kabupaten	Kab. Bangka dan Kab. Bangka Barat	Terlaksananya Operasional Kantor Cabang Dinas	12 Bulan	160.640.000	- Peningkatan Fungsi Pelayanan Kantor Cabang Dinas Kabupaten Bangka dan	Kab. Bangka dan Kab. Bangka Barat	Terlaksananya Operasional Kantor Cabang Dinas	12 Bulan	160.640.000	

	Bangka dan Bangka Barat					Bangka Barat					
	- Peningkatan Fungsi Pelayanan Kantor Cabang Dinas Kabupaten Belitung dan Belitung Timur	Kab. Belitung dan Kab. Belitung Timur	Terlaksananya Operasional Kantor Cabang Dinas	12 Bulan	260.640.000	- Peningkatan Fungsi Pelayanan Kantor Cabang Dinas Kabupaten Belitung dan Belitung Timur	Kab. Belitung dan Kab. Belitung Timur	Terlaksananya Operasional Kantor Cabang Dinas	12 Bulan	260.640.000	
	- Peningkatan Fungsi Pelayanan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Kab. Bangka Tengah, Bangka Barat, Bangka dan Belitung Timur	Terlaksananya Operasionalisasi KPH	12 Bulan	1.561.580.000	- Peningkatan Fungsi Pelayanan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Kab. Bangka Tengah, Bangka Barat, Bangka dan Belitung Timur	Terlaksananya Operasionalisasi KPH	12 Bulan	1.561.580.000	

2	- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	643.620.000	- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	643.620.000	
	- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pangkalpinang	Terpeliharanya Gedung Kantor	10 Bulan	173.000.000	- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pangkalpinang	Terpeliharanya Gedung Kantor	10 Bulan	173.000.000	
	- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pangkalpinang	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	12 Bulan	335.620.000	- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pangkalpinang	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	12 Bulan	335.620.000	
	- Pengadaan Peralatan	Pangkalpinang	Tersedianya	1 Unit Kulkas,	135.000.000	- Pengadaan Peralatan	Pangkalpinang	Tersedianya Peralatan	1 Unit	135.000.000	

	Gedung Kantor		Peralatan Kantor Berupa Kamera Foto, GPS, Laptop, Drone dan Kulkas	1 Unit Kamera, 1 Unit Drone, 1 Unit handyca m, 1 paket CCTV dan 2 Unit GPS		Gedung Kantor		Kantor Berupa Kamera Foto, GPS, Laptop, Drone dan Kulkas	Kulkas, 1 Unit Kamera, 1 Unit Drone, 1 Unit handyca m, 1 paket CCTV dan 2 Unit GPS		
3	Program Peningkatan Kapasitas		Persentase Peningkatan		150.000.000	Program Peningkatan Kapasitas		Persentase Peningkatan		150.000.000	

	Sumber Daya Aparatur		tan Kapasita s Sumber Daya Aparatur			Sumber Daya Aparatur		an Kapasitas Sumber Daya Aparatur			
	- Pendidikan dan Pelatihan Teknis	Pangkalpina ng	Terlaksan anya Pendidika n dan Pelatihan tenaga teknis bidang kehutana n	Aparatur /SDM Kehutan an	150.000.000	- Pendidikan dan Pelatihan Teknis	Pangkal pinang	Terlaksana nya Pendidikan dan Pelatihan tenaga teknis bidang kehutanan	Apar atur/ SDM Keh utan an	150.000.000	
4	Program Peningkatan Disiplin Daya Aparatur		Persenta se Peningka tan Disiplin Sumber Daya Aparatur	100%	81.500.000	Program Peningkatan Disiplin Daya Aparatur		Persentas e Peningkat an Disiplin Sumber Daya Aparatur	100 %	81.500.000	
	- Pengadaan	Pangkalpina	Tersedian	168 stel	81.500.000	- Pendidikan dan	Pangkal	Tersediany	168	81.500.000	

	Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	ng	ya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya			pelatihan teknis dan fungsi fungsional	pinang	a Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	stel		
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	90%	372.465.000	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	90%	372.465.000	
	-Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Pangkalpinang	Renstra PD 2017-2022, Renja PD	3 Dokumen	244.615.000	-Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pangkalpinang	Renstra PD 2017-2022, Renja PD 2018	3 Dokumen	244.615.000	

	Daerah		2018 dan Renja Perubaha n PD 2017					dan Renja Perubahan PD 2017			
	- Penyusuna n Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Pangkalpina ng	Laporan Triwulan Pengenda lian dan Evaluasi Renja PD, LAKIP PD, LPPD PD, LKPJ PD, Laporan Semester an Keuangan PD	5 Jenis Dokume n/Lapor an	127.850.000	- Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Pangkal pinang	Laporan Triwulan Pengendali an dan Evaluasi Renja PD, LAKIP PD, LPPD PD, LKPJ PD, Laporan Semestera n Keuangan PD	5 Jeni s Dok ume n/La pora n	127.850.000	
6	Program Pemanfaata n Potensi Sumber		Tingkat Pemanfaa tan Potensi	5 (Rekom endasi)	1.497.298.000	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan		Tingkat Pemanfaat an Potensi Sumber	5 (Rek ome ndas	1.497.298.000	

	Daya Hutan		Sumber Daya Hutan					Daya Hutan	i)		
	- Monitoring dan Evaluasi Penatausahaan Hasil Hutan	7 Kab/Kota	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penatausahaan Hasil Hutan	12 Bulan	120.000.000	- Monitoring dan Evaluasi Penatausahaan Hasil Hutan	7 Kab/Kota	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penatausahaan Hasil Hutan	12 Bulan	120.000.000	
	- Pendampingan dan Sosialisasi Hutan Tanaman Industri (HTI)	6 Kab dan Kota Pangkalpinang (Sosialisasi)	Terselenggaranya Sosialisasi HTI	Pertemuan dengan aparat desa dan pembinaan ke perusahaan	127.180.000	- Pendampingan dan Sosialisasi Hutan Tanaman Industri (HTI)	6 Kab dan Kota Pangkalpinang (Sosialisasi)	Terselenggaranya Sosialisasi HTI	Pertemuan dengan aparat desa dan pembinaan	127.180.000	

									ke peru saha an		
	- Penguatan dan Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat (HTR)	7 Kab/Kota	Terselenggara sosialisasi, verifikasi pendampingan dan ama kelompok tani hutan tanaman rakyat	10 verifikasi KTH, 8 Tenaga Pendamping, 1 Kali bimbingan teknis	318.553.000	- Penguatan dan Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat (HTR)	7 Kab/Kota	Terselenggara sosialisasi, verifikasi pendampingan dan ama kelompok tani hutan tanaman rakyat	10 verifikasi KTH, 8 Tenaga Pendamping, 1 Kali bimbingan teknis	318.553.000	
	- Pengembangan industri	Jakarta, Pangkalpinang	Terlaksana anyapromosi	6 bulan	384.910.000	- Pengembangan industri dan pemasaran	Jakarta, Pangkalpinang	Terlaksana anyapromosi	6 bulan	384.910.000	

	dan pemasaran hasil hutan		produk-produk hasil hutan kayu dan bukan kayu			hasil hutan		produk-produk hasil hutan kayu dan bukan kayu			
	- Pengembangan Gaharu	Bangka Tengah	Terfasilitasinya Bantuan Saran dan Prasarana Pengelolaan dan Pemasaran HHBK	1 Gapokan agharu dan sarana pengelolaan HHBK	465.000.000	- Pengembangan Gaharu	Bangka Tengah	Terfasilitasinya Bantuan Saran dan Prasarana Pengelolaan dan Pemasaran HHBK	1 Gapokan agharu dan sarana pengelolaan HHBK	465.000.000	
	- Bedah kinerja izin usaha pemanfaatan	Pangkalpinang	Teridentifikasinya kendala dan	8 IUPHHK-HTI	81.655.000	- Bedah kinerja izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu	Pangkalpinang	Teridentifikasinya kendala dan	8 IUPHHK-HTI	81.655.000	

	an hasil hutan kayu		masalah pembang unan HTI					masalah pembangun an HTI			
7	Perencanaa n dan Pengemban gan Hutan	7 Kab/Kota	Terjamin ya kepastian kawasan hutan sesuai fungsi hutan	100%	843.630.000	Program Rehabilitasi hutan dan Lahan				843.630.000	
	- Penyediaa n Data dan Informasi Kawasan Hutan Melalui Pemanfaat an SIG Kehutanan	7 Kab/Kota	Terlaksan anya Kegiatan penyedia an data dan informasi kawasan hutan melalui pemanfaa tan SIG Kehutana	10 Bulan	141.070.000	- Penyediaan Data dan Informasi Kawasan Hutan Melalui Pemanfaatan SIG Kehutanan	7 Kab/Kot a	Terlaksana nya Kegiatan penyediaan data dan informasi kawasan hutan melalui pemanfaata n SIG Kehutanan	10 Bula n	141.070.000	

			n								
	- Pemantapan Keberadaan Fungsi Kawasan Hutan	6 Kab	Terlaksananya Kegiatan yang terkait dengan pemantapan kawasan hutan	40 KM trayek batas luar kawasan hutan dan bimtek di 6 kabupaten	122.770.000	- Pemantapan Keberadaan Fungsi Kawasan Hutan	6 Kab	Terlaksananya Kegiatan yang terkait dengan pemantapan kawasan hutan	40 KM trayek batas luar kawasan hutan dan bimtek di 6 kabupaten	122.770.000	
	- Evaluasi dan bimbingan	Pangkalpinang	Jumlah aparatur yang mengikuti	30 orang	97.030.000	- Evaluasi dan bimbingan Teknis	Pangkalpinang	Jumlah aparatur yang mengikuti	30 orang	97.030.000	

	Teknis Penyegara n di Bidang Perpetaan Kehutanan		bimbinga n teknis dan evaluasi bidang perpetaan kehutana n			Penyegaran di Bidang Perpetaan Kehutanan		bimbingan teknis dan evaluasi bidang perpetaan kehutanan			
	- Monitoring dan evaluasi izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH)	6 Kab	Terlaksan anya monitorin g dan evaluasi terhadap pemegan g izin pengguna an kawasan hutan	3 Pemega ng izin	135.800.000	- Monitoring dan evaluasi izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH)	6 Kab	Terlaksana nya monitoring dan evaluasi terhadap pemegang izin penggunaa n kawasan hutan	3 Pem egan g izin	135.800.000	
	-					-					

	- Rekonsiliasi data dan informasi pembangunan kehutanan se-provinsi Kepulauan Bangka Belitung	7 Kab/Kota	Terlaksananya rekonsiliasi data dan informasi pembangunan kehutanan se-prov. Kep. Babel	7 Kab/Kota	184.780.000	- Rekonsiliasi data dan informasi pembangunan kehutanan se-provinsi Kepulauan Bangka Belitung	7 Kab/Kota	Terlaksananya rekonsiliasi data dan informasi pembangunan kehutanan se-prov. Kep. Babel	7 Kab/Kota	184.780.000	
	- Bimbingan Teknis Pemenuhan Kewajiban Bagi Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan	Pangkalpinang	Terlaksananya bimbingan teknis terhadap IPPKH dan aparaturn kehutanan	40 peserta	55.180.000	- Bimbingan Teknis Pemenuhan Kewajiban Bagi Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan	Pangkalpinang	Terlaksananya bimbingan teknis terhadap IPPKH dan aparaturn kehutanan	40 peserta	55.180.000	

	- Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) Provinsi Tahun 2016	Pangkalpinang	Terlaksananya penyusunan dan sosialisasi NSDH	1 Dokumen	107.000.000	- Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) Provinsi Tahun 2016	Pangkalpinang	Terlaksananya penyusunan dan sosialisasi NSDH	1 Dokumen	107.000.000	
7	Program Perlindungan dan Konservasi SDA		Jumlah Pellanggaran hutan yang ditindaklanjuti (%) dan penurunan luas kebakaran	60 orang tenaga pengamanan swakarsa dan 10 polisi kehutan	1.516.875.000	Program Perlindungan dan Konservasi SDA		Jumlah Pellanggaran hutan yang ditindaklanjuti (%) dan penurunan luas kebakaran	60 orang tenaga pengamanan swakarsa dan 10 polisi	1.516.875.000	

									si keh utan an		
	- Peningkatan Fungsi Pengamanan Hutan (Pamhut)	7 Kab/Kota	Terselenggara upaya perlindungan hutan dan hasil hutan	15 orang pamhut	464.320.000	- Peningkatan Fungsi Pengamanan Hutan (Pamhut)	7 Kab/Kota	Terselenggara upaya perlindungan hutan dan hasil hutan	15 orang pamhut	464.320.000	
	- Pengendalian kebakaran hutan dan sosialisasi peraturan bidang perlindungan hutan	6 Kabupaten	Terlaksananya pertemuan pengendalian kebakaran hutan dan sosialisasi peraturan bidang perlindungan	1 kali	180.800.000	- Pengendalian kebakaran hutan dan sosialisasi peraturan bidang perlindungan hutan	6 Kabupaten	Terlaksananya pertemuan pengendalian kebakaran hutan dan sosialisasi peraturan bidang perlindungan hutan	1 kali	180.800.000	

			gan hutan								
	- Pertemuan koordinasi pengamanaan hutan tingkat provinsi	6 kabupaten	Terlaksananya pertemuan koordinasi pengamanaan hutan tingkat provinsi	1 kali	190.420.000	- Pertemuan koordinasi pengamanaan hutan tingkat provinsi	6 kabupaten	Terlaksananya pertemuan koordinasi pengamanaan hutan tingkat provinsi	1 kali	190.420.000	
	- Perlindungan dan pengamanaan hutan terpadu di Prov. Kep. Babel	6 Kabupaten	Terlaksananya perlindungan dan pengamanaan hutan terpadu	6 Kab	188.720.000	- Perlindungan dan pengamanaan hutan terpadu di Prov. Kep. Babel	6 Kabupaten	Terlaksananya perlindungan dan pengamanaan hutan terpadu	6 Kab	188.720.000	
	- Penilaian lomba PKA Wana Lestari	7 Kab/Kota	Tersedianya penilaian Lomba PKA	Terpilihnya 3 Nominasi PKA Wana	145.330.000	- Penilaian lomba PKA Wana Lestari	7 Kab/Kota	Tersedianya penilaian Lomba PKA Wana Lestari	Terpilihnya 3 Nominasi	145.330.000	

			Wana Lestari	Lestari					PKA Wana Lestari		
	- Penyusunan rencana pengelolaan hutan lindung di Prov. Kep. Babel	Bangka Tengah dan Kab. Belitung	Tersusunnya rencana pengelolaan hutan lindung di prov. Kep. Babel	2 Dokumen	135.825.000	- Penyusunan rencana pengelolaan hutan lindung di Prov. Kep. Babel	Bangka Tengah dan Kab. Belitung	Tersusunnya rencana pengelolaan hutan lindung di prov. Kep. Babel	2 Dokumen	135.825.000	
	- Identifikasi Potensi dan Sebaran Mangrove di Prov. Kep. Babel	Kab. Bangka	Tersusunnya buku potensi dan sebaran mangrove di pprov. Kep. Babel	1 Dokumen	131.910.000	- Identifikasi Potensi dan Sebaran Mangrove di Prov. Kep. Babel	Kab. Bangka	Tersusunnya buku potensi dan sebaran mangrove di pprov. Kep. Babel	1 Dokumen	131.910.000	
	- Inventarisasi	Kab. Bangka dan Bangka	Tersedianya data	1 Dokumen	79.550.000	- Inventarisasi Ekosistem	Kab. Bangka	Tersedianya data	1 Dok	79.550.000	

	Ekosistem Esensial di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Barat	ekosistem esensial di prov. Kep. Babel	n		Esensial di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	dan Bangka Barat	ekosistem esensial di prov. Kep. Babel	ume n		
8	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan		Penurunan Luas Lahan Kritis		2.691.680.000	Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan		Penurunan Luas Lahan Kritis		2.691.680.000	
	- Pembinaan dan Pengendalian Pemenuhan Kewajiban Rehabilitasi DAS bagi pemegang IPPKH se-Prov. Kep.	Kab. Bangka (2 IPPKH) dan Kab. Belitung Timur (1 IPPKH)	Terlaksananya pengawasan terhadap pemegang IPPKH se prov. Dalam rangka pemenuhan kewajiban	3 Pemegang IPPKH	112.550.000	- Pembinaan dan Pengendalian Pemenuhan Kewajiban Rehabilitasi DAS bagi pemegang IPPKH se-Prov. Kep. Babel	Kab. Bangka (2 IPPKH) dan Kab. Belitung Timur (1 IPPKH)	Terlaksananya pengawasan terhadap pemegang IPPKH se prov. Dalam rangka pemenuhan kewajiban	3 Pemegang IPPKH	112.550.000	

	Babel										
	- Pengelolaa n perbenihan tanaman hutan di Prov. Kep. Babel	Belitung Timur, Belitung, Bangka dan Bangka Selatan	Terpelihar anya sumber benih dan bibit tanaman hutan yang bermutu baik dan bersertifik asi	3 tegakan benih teridentif ikasi dan 4 pengad a/penge dan penged ar benih/bi bit tanama n hutan	211.000.000	- Pengelolaan perbenihan tanaman hutan di Prov. Kep. Babel	Belitung Timur, Belitung , Bangka dan Bangka Selatan	Terpelihara nya sumber benih dan bibit tanaman hutan yang bermutu baik dan bersertifika si	3 tega kan beni h terid entifi kasi dan 4 peng ada/ peng edan peng edar beni h/bib it tana man huta	211.000.000	

									n		
	- Rehabilitasi lahan kritis di dalam kawasan dan luar kawasan hutan	6 kabupaten	Terlaksana anya areal rehabilitasi lahan kritis dalam kawasan hutan dan luar kawasan hutan	60 Ha	1.151.630.000	- Rehabilitasi lahan kritis di dalam kawasan dan luar kawasan hutan	6 kabupaten	Terlaksana nya areal rehabilitasi lahan kritis dalam kawasan hutan dan luar kawasan hutan	60 Ha	1.151.630.000	
	- Penanaman dalam rehabilitasi DAS pada IPPKH pantai lingkaran timur di Prov. Kep. Babel	Kab. Bangka	Telah ter rehabilitasi DAS seluas 70 Ha	70 Ha	685.500.000	- Penanaman dalam rehabilitasi DAS pada IPPKH pantai lingkaran timur di Prov. Kep. Babel	Kab. Bangka	Telah ter rehabilitasi DAS seluas 70 Ha	70 Ha	685.500.000	

	- Puncak aksi penanaman satu milyar pohon tingkat Prov. Kep. Babel	Kab. Bangka Barat	Tercapai jumlah penghijauan/penanaman yang dilakukan provinsi	10 Juta Pohon	280.540.000	- Puncak aksi penanaman satu milyar pohon tingkat Prov. Kep. Babel	Kab. Bangka Barat	Tercapai jumlah penghijauan/penanaman yang dilakukan provinsi	10 Juta Pohon	280.540.000	
	- Pembinaan dan pemeliharaan hutan kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Desa (HD)	Bangka tengah, belitung dan belitung timur	Terlaksanaanya pembinaan dan pemeliharaan hutan kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Desa	11 kelompok HKm dan 1 HD	250.460.000	- Pembinaan dan pemeliharaan hutan kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Desa (HD)	Bangka tengah, belitung dan belitung timur	Terlaksanaanya pembinaan dan pemeliharaan hutan kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Desa	11 kelompok HKm dan 1 HD	250.460.000	

2.5 USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Keterkaitan program dan kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tak terlepas dari berbagai para pemangku kepentingan, hal ini dikarenakan begitu banyaknya tantangan yang harus segera diselesaikan guna tercapainya penyelenggaraan kehutanan secara optimal sehingga didapatkan pengaruh semakin membaiknya kualitas sumber daya hutan dan meningkatnya manfaat hutan. Indikator membaiknya kualitas sumber daya hutan adalah menurunnya deforestasi dan degradasi hutan serta terselenggaranya upaya – upaya rehabilitasi, sedangkan indikator meningkatnya manfaat hutan ditandai dengan meningkatnya kontribusi hutan terhadap perekonomian nasional berupa Pendapatan Domestik Bruto (PDB), penyediaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha masyarakat, serta meningkatnya kualitas lingkungan hidup termasuk dalam konteks mitigasi dan adaptasi perubahan iklim global.

Tabel 7

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Nama : Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)
1.	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan : - Pengembangan industri dan pemasaran hasil hutan	Jakarta	Meningkatnya pemanfaatan produksi hasil hutan	1 %	

	<ul style="list-style-type: none"> - Pendampingan Sosialisasi HTI dan - Penguatan Pengembangan HTR dan - Pengembangan Gaharu 	Pangkalpinang Pangkalpinang Bangka Tengah	Jumlah luas areal pencadangan izin (HTI/HTR) Meningkatnya PNPB Bantuan Sarpras Pengelolaan dan Pemasaran HHBK	110 Ha Rp. 500.000.000 1 Gapoktan Gaharu dan Sarana Pengolahan HHBK	
2.	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan : <ul style="list-style-type: none"> - Rehabilitasi Lahan Kritis di Dalam dan Luar Kawasan Hutan - Penanaman dalam Rehabilitasi DAS pada IPPKH Pantai Lingkar Timur di Prov. Kep. Babel - Pembinaan dan Pemeliharaan Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa 	6 Kabupaten Kabupaten Bangka Kabupaten Bangka Tengah, Belitung, dan Belitung Timur	Jumlah Areal Rehab Lahan Kritis Jumlah Rehabilitasi Areal DAS Jumlah Kelompok HKm dan HD	60 Ha 70 Ha 11 HKm dan 1 HD	
3	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan :		Prosentase kasus		

	- Perlindungan dan pengamanan hutan terpadu	Provinsi Babel	Kep.	tindak pidana kehutanan yang tertangani	30 %	
4.	Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan : - Operasionalisasi GIS dan peralatan pendukung pengukuran dan perpetaan - Monitoring dan evaluasi penggunaan kawasan hutan - Rekonsiasi data dan informasi pembangunan kehutanan se-Provinsi Kep. Babel - Pemantapan kawasan hutan	Provinsi Babel Provinsi Babel Provinsi Babel Provinsi Babel	Kep. Kep. Kep. Kep.	Terlaksananya pelayanan kesediaan peta dan informasi kawasan hutan Terwujudnya pengendalian terhadap pemanfaatan kawasan hutan Dokumen database pembangunan kehutanan Prov. Kep. Babel Tersedianya data kondisi batas lapangan kawasan hutan	100 % 6 pemegang izin PKH 1 Dokumen 40 km trayek batas luar kawasan hutan	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Kebijakan pembangunan dibidang kehutanan merupakan kebijakan yang dilakukan pada tingkat nasional dan daerah. Kebijakan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait dengan kehutanan adalah : Peningkatan kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia serta kelembagaan penyelenggara kehutanan yang professional dalam rangka mewujudkan *good governance* dan *clean government*, memantapkan keberadaan dan fungsi kawasan hutan, mendukung terselenggaranya perlindungan, pengamanan hutan dan konservasi sumberdaya alam, meningkatkan upaya reboisasi, rehabilitasi hutan dan lahan serta reklamasi hutan, meningkatkan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL).

Kebijakan nasional dan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di sinkronkan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai fungsi sebagai penyelenggara kehutanan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Tahun 2017

Tujuan dan sasaran renja Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017 dikaitkan dengan sasaran target kerja renstra SKPD adalah sebagai berikut:

a. Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan program kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP);
2. Meningkatkan pengembangan kawasan Hutan Produksi melalui pengembangan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan Hutan Tanaman Industri (HTI);
3. Meningkatkan pemberdayaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK);
4. Meningkatkan tertib peredaran hasil hutan dan iuran hasil hutan;
5. Mempromosikan berbagai produk unggul dari kehutanan;
6. Menurunkan luas lahan kritis dan meningkatkan daya dukung DAS melalui upaya rehabilitasi dan reklamasi hutan dan lahan serta pengelolaan DAS berkelanjutan;
7. Mendukung terciptanya perlindungan dan pengamanan hutan;
8. Mengembangkan upaya konservasi hutan, sumber daya alam dan pemanfaatan jasa lingkungan termasuk wisata alam;
9. Meningkatkan pelaksanaan pembangunan hutan rakyat dalam rangka peningkatan perekonomian;
10. Memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan atas status, letak batas dan luas kawasan hutan;
11. Mewujudkan operasionalisasi kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang berkelanjutan;
12. Menciptakan harmonisasi perencanaan dan pelaksanaan tata ruang dalam rangka mendukung pemantapan kawasan hutan;
13. Meningkatkan pelayanan publik dalam hal pengecekan kawasan hutan di lapangan dengan lebih efektif dan efisien;
14. Mewujudkan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan fungsi dan peraturan yang berlaku;
15. Terpeliharanya kondisi dan kualitas peralatan GIS sehingga dapat beroperasi dengan baik dalam melakukan pelayanan publik;

b. Sasaran

Mengacu pada tujuan dimaksud, maka terdapat beberapa prioritas sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2017 yaitu :

1. Tersosialisasinya kebijakan pembangunan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan Hutan Tanaman Industri (HTI);
2. Terlatihnya masyarakat sekitar hutan dalam pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK);
3. Tertibnya administrasi peredaran dan iuran hasil hutan;
4. Terpromosinya/dikenalnya produk-produk unggul dari kehutanan;
5. Terselenggaranya upaya rehabilitasi hutan dan lahan;
6. Terlaksananya pengelolaan DAS berkelanjutan;
7. Terlaksananya upaya reklamasi bekas tambang dalam kawasan hutan;
8. Terselenggaranya perlindungan dan pengamanan hutan secara optimal bersama partisipasi masyarakat;
9. Terwujudnya sistem pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
10. Terwujudnya pengelolaan kawasan hutan konservasi dan hutan/kawasan lindung secara optimal;
11. Berkembangnya konservasi sumberdaya alam dan pemanfaatan jasa lingkungan serta wisata alam berbasis masyarakat;
12. Terjaminnya kawasan hutan sehingga pengelolaan sumber daya hutan dapat dilaksanakan secara lebih optimal;
13. Terbentuknya kelembagaan Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) dan terlaksananya operasionalisasi Kesatuan Pengelola Hutan (KPH);
14. Terselenggaranya harmonisasi perencanaan tata ruang dalam mendukung pemantapan Kawasan Hutan (KH);
15. Tersedianya sarana dan prasarana pemetaan untuk mendukung kelancaran kegiatan penatausahaan kawasan hutan provinsi;
16. Terwujudnya penggunaan Kawasan Hutan (KH) sesuai fungsi peruntukan dan peraturan yang berlaku;

17. Teroperasinya peralatan GIS untuk penyediaan data dan peta kehutanan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik;
18. Tersedianya data dan informasi sumber daya hutan yang akurat dan terkini;

3.3 Program dan Kegiatan 2017

Rumusan program dan kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rencana tahun 2017 disesuaikan dengan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2013 - 2017, rencana tersebut juga dirumuskan untuk mencapai visi dan misi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

- 1) Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
 - a. Monitoring dan Evaluasi Penatausahaan Hasil Hutan
Rp. 120.000.000,-
 - b. Pendampingan dan Sosialisasi Hutan Tanaman Industri (HTI)
Rp. 127.180.000,-
 - c. Penguatan dan Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat (HTR)
Rp. 318.553.000,-
 - d. Pengembangan industri dan pemasaran hasil hutan
Rp. 384.910.000,-
 - e. Pengembangan Gaharu
Rp. 465.000.000,-
 - f. Bedah kinerja izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu
Rp. 81.655.000,-
- 2) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
 - a. Peningkatan Fungsi Pengamanan Hutan (Pamhut)
464.320.000,-
 - b. Pengendalian kebakaran hutan dan sosialisasi peraturan bidang perlindungan hutan
Rp. 180.800.000,-

- c. Pertemuan koordinasi pengamanan hutan tingkat provinsi
Rp. 190.420.000,-
 - d. Perlindungan dan pengamanan hutan terpadu di Prov. Kep. Babel
Rp. 188.720.000,-
 - e. Penilaian lomba PKA Wana Lestari
Rp. 145.330.000,-
 - f. Penyusunan rencana pengelolaan hutan lindung di Prov. Kep. Babel
Rp. 135.825.000,-
 - g. Identifikasi Potensi dan Sebaran Mangrove di Prov. Kep. Babel
Rp. 131.910.000,-
 - h. Inventarisasi Ekosistem Esensial di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Rp. 79.550.000,-
- 3) Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan
- a. Penyediaan Data dan Informasi Kawasan Hutan Melalui Pemanfaatan SIG Kehutanan
Rp. 141.070.000,-
 - b. Pemantapan Keberadaan Fungsi Kawasan Hutan
Rp. 122.770.000,-
 - c. Evaluasi dan bimbingan Teknis Penyegaran di Bidang Perpetaan Kehutanan
Rp. 97.030.000,-
 - d. Monitoring dan evaluasi izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH)
Rp. 135.800.000,-
 - e. Rekonsiliasi data dan informasi pembangunan kehutanan se-provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Rp. 184.780.000,-
 - f. Bimbingan Teknis Pemenuhan Kewajiban Bagi Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan
Rp. 55.180.000,-

- g. Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) Provinsi Tahun 2016
Rp. 107.000.000,-
- 4) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
 - a. Pembinaan dan Pengendalian Pemenuhan Kewajiban Rehabilitasi DAS bagi pemegang IPPKH se-Prov. Kep. Babel
Rp. 112.550.000,-
 - b. Pengelolaan perbenihan tanaman hutan di Prov. Kep. Babel
Rp. 211.000.000,-
 - c. Rehabilitasi lahan kritis di dalam kawasan dan luar kawasan hutan
Rp. 1.151.630.000,-
 - d. Penanaman dalam rehabilitasi DAS pada IPPKH pantai lingkaran timur di Prov. Kep. Babel
685.500.000,-
 - e. Puncak aksi penanaman satu milyar pohon tingkat Prov. Kep. Babel
280.540.000,-
 - f. Pembinaan dan pemeliharaan hutan kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Desa (HD)
250.460.000,-

Tabel 8

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
PD TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

PD: Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Perkiraan Perubahan Maju Rencana Tahun 2018	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
- Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan surat yang terkirim	Pangkal pinang	12 bulan	30.000.000	APBD	Penambahan anggaran	12 bulan	60.000.000

- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pangkalpinang	12 bulan	114.000.000	APBD	Penambahan Anggaran	12 bulan	214.000.000
- Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya tenaga administrasi keuangan	Pangkalpinang	18 orang	149.430.000	APBD		19 orang	149.430.000
- Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan tersedianya jasa kebersihan kantor	Pangkalpinang	12 bulan	40.000.000	APBD	Penambahan anggaran	12 bulan	53.200.000
- Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah bulan Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Pangkalpinang	12 bulan	47.800.000	APBD		12 bulan	47.800.000
- Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK)	Jumlah bulan Tersedianya Alat Tulis kantor (ATK)	Pangkalpinang	12 bulan	90.000.000	APBD	Penambahan Anggaran	12 bulan	135.400.000
- Penyediaan barang	Jumlah bulan Tersedianya	Pangkalpinang	12 bulan	60.000.000	APBD		12 bulan	60.000.000

cetakan dan penggandaan	barang cetakan dan penggandaan							
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya bahan komponen instalasi/penerangan bangunan kantor	Pangkalpinang	12 bulan	30.000.000	APBD	Penambahan anggaran	12 bulan	60.000.000
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Pangkalpinang	12 bulan	7.200.000	APBD	Penambahan anggaran	12 bulan	15.200.000
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	Pangkalpinang	12 bulan	12.840.000	APBD	Penambahan anggaran	12 bulan	15.600.000
- Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan Tersedianya makanan dan minuman	Pangkalpinang	12 bulan	34.700.000	APBD	Penambahan anggaran	12 bulan	55.200.000
- Rapat-rapat	Jumlah bulan	Pangkalpinang	12 bulan	350.000.000	APBD		12 bulan	350.000.000

koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	tersedianya rakor dan konsultasi ke luar daerah	pinang						
- Koordinasi, konsolidasi ke dalam daerah	Jumlah bulan terlaksananya koordinasi dan konsolidasi ke dalam daerah	7 Kabupat en/Kota	12 bulan	150.000.000	APBD			
- Penyediaan jasa penunjang pengelolaan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran	Pangkal pinang	12 bulan	286.090.000	APBD		12 bulan	286.090.000
- Penyediaan jasa penunjang pengelolaan pelayanan administrasi perkantoran	Terlaksananya pelayanan penunjang dan pengerlolaan administrasi perkantoran	Pangkal pinang	12 bulan	286.090.000	APBD		12 bulan	286.090.000

Peningkatan Fungsi Pelayanan Kantor Cabang Dinas Kabupaten Kehutanan di Bangka Tengah dan Bangka Selatan	Terlaksananya Oprasional Kantor Cabang Dinas	Kabupaten Bangka Tengah dan Bangka Selatan	12 bulan	160.640.000,-	APBD		12 bulan	160.640.000,-
Peningkatan Fungsi Pelayanan Kantor Cabang Dinas Kabupaten Bangka dan Bangka Barat	Terlaksananya Oprasional Kantor Cabang Dinas	Kabupaten Bangka dan Bangka Barat	12 bulan	160.640.000,-	APBD		12 bulan	160.640.000,-
Peningkatan Fungsi Pelayanan Kantor Cabang Dinas Kabupaten Belitung dan Belitung Timur	Terlaksananya Oprasional Kantor Cabang Dinas	Kabupaten Belitung dan Belitung Timur	12 bulan	260.640.000,-	APBD		12 bulan	260.640.000,-
Peningkatan Fungsi	Terlaksananya	Kabupaten						

Pelayanan Kesatuan Pengelolaan Hutan	operasional KPH	en Bangka Tengah, Bangka Barat, Bangka dan Belitung Timur						
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah bulan terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	Pangkalpinang	10 bulan	173.000.000	APBD	Penambahan anggaran	10 bulan	273.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah bulan terlaksananya pemeliharaan rutin atau berkala kendaraan	Pangkalpinang	12 bulan	335.620.000	APBD	Penambahan anggaran	12 bulan	435.620.000

	dinas/operasional							
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	tersedianya peralatan kantor	Pangkalpinang	1 kulkas, 1 kamera, 1 drone, 1 handycam, 1 paket CCTV dan 2 unit GPS	135.000.000	APBD	Penambahan anggaran	5 Laptop, 7 Kamera, 10 GPS	300.000.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur								
- Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Jumlah tersedianya pakaian dinas untuk 160 pegawai	Pangkalpinang	160 stel	80.000.000	APBD		160 stel	80.000.000
Program Peningkatan Kapasitas								

Sumber Daya Aparatur								
Pendidikan dan pelatihan teknis	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan tenaga teknis bidang kehutanan	Pangkalpinang dan luar daerah	Aparatur / SDM Dishut	150.000.000	APBD	Penambahan anggaran	Aparatur / SDM Dishut	300.000.000
Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan								
Monitoring dan Evaluasi Pantausahaan Hasil Hutan	Tercapainya tertib penataan hasil hutan	7 Kabupaten/Kota		120.000.000	APBD			120.000.000
Pendampingan dan Sosialisasi Hutan Tanaman Industri (HTI)	Terselenggaranya Sosialisasi HTI	6 Kabupaten	50 orang	127.180.000	APBD		50 orang	127.180.000

Penguatan dan Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat (HTR)	Terselenggaranya sosialisasi, verifikasi. Pendampingan dan ama Kelompok Tani Hutan -Hutan Tanaman Rakyat	Verifikasi KTH, Jumlah tenaga pendamping	10 KTH, 8 Tenaga Pendamping	293.250.000	APBD			245.550.000
Pengembangan industri dan pemasaran hasil hutan	Terlaksananya promosi produk hasil hutan	Jakarta, Pangkalpinang	Aparatur dan pelaku usaha	384.910.000	APBD		Jakarta, Pangkalpinang	384.910.000
Pengembangan Gaharu	Terfasilitasinya Bantuan Saran dan Prasarana Pengelolaan dan Pemasaran HHBK	Kabupaten Bangka Tengah	1 Gapoktan dan sarana pengolahan HHBK	465.000.000	APBD			100.000.000
Bedah Kinerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu	Teridentifikasinya kendala dan masalah pembangunan HTI	6 Kabupaten	8 IUPHHK-HTI	81.655.000	APBD		8 IUPHHK-HTI	81.655.000

Program perlindungan dan konservasi SDA								
Peningkatan Fungsi Pengamanan Hutan (PamHut)	Terselenggaranya Upaya Perlindungan Hutan dan Hasil Hutan	7 Kab/Kota	15 Pamhut	464.320.000	APBD		15 Pamhut	464.320.000
Pengendalian Kebakaran Hutan dan Sosialisasi peraturan bidang perlindungan hutan	Terlaksananya Pertemuan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Sosialisasi Peraturan Bidang Perlindungan Hutan	6 Kabupaten	80 orang	180.800.000	APBD		80 orang	180.800.000
Pertemuan Koordinasi Pengamanan	Terlaksananya Pertemuan Koordinasi	6 Kabupaten	60 orang	190.420.000	APBD		60 orang	190.420.000

Hutan Tingkat Provinsi	Pengamanan Hutan Tingkat Provinsi							
Perlindungan dan pengamanan hutan terpadu di Prov. Kep. Babel	Terlaksananya Perlindungan dan Pengamanan Hutan Terpadu	Prosentase penanganan Tipihut	30 %	188.720.000	APBD		30 %	188.720.000
Penilaian Lomba PKA Wana Lestari	Tersedianya Penilaian Lomba PKA Wana Lestari	Jumlah nominasi PKA Wana Lestari	3 nominasi	145.330.000	APBD		3 nominasi	145.330.000
Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Lindung di Prov. Kep.	Tersusunnya Rencana Pengelolaan Hutan Lindung di Prov. Kep. Babel	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	135.825.000	APBD		2 Dokumen	135.825.000

Babel -								
Identifikasi Potensi dan Sebaran Mangrove di Prov. Kep. Babel	Tersusunnya Buku Potensi dan sebaran Mangrove di Prov. Kep. Babel	Kabupat en Bangka	1 dokumen	131.910.000	APBD		1 dokumen	131.910.000
Inventarisasi Ekosistem Esensial di Prov. Kep. Babel	Tersedianya Data Ekosistem Essensial di Prov. Kep. Babel	Kabupat en Bangka, Bangka Barat	1 Dokumen	79.550.000	APBD		1 Dokumen	79.550.000
Program Perencanaan dan pengembangan hutan								
Penyediaan Data dan	Terlaksana kegiatan	Pangkap inang	10 bulan	141.070.000	APBD		10 bulan	141.070.000

Informasi Kawasan Hutan melalui Pemanfaatan SIG Kehutanan	penyediaan data dan informasi kawasan hutan melalui pemanfaatan SIG Kehutanan							
Pemantapan Keberadaan Fungsi Kawasan Hutan	Terlaksananya kegiatan terkait pemantapan kawasan hutan	6 Kabupat en/Kota	Batas Sepanjang 40 KM trayek Batas Luar Kawasan Hutan dan Rapat Evaluasi	122.770.000	APBD		Batas Sepanjang 40 KM trayek Batas Luar Kawasan Hutan dan Rapat Evaluasi	122.770.000
Evaluasi dan Bimbingan Teknis Penyegaran di Bidang	Jumlah aparatur	Pangkalpinang dan luar daerah	30 orang	97.030.000	APBD		30 orang	97.030.000

Perpetaan Kehutanan								
Monitoring dan Evaluasi izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)	Terlaksananya monwev terhadap pemegang izin penggunaan kawasan hutan	Jumlah pemegang izin	3 Perusahaan	135.800.000	APBD		3 Perusahaan	135.800.000
Rekonsiliasi data dan Informasi Pembangunan Kehutanan se-Prov. Kep. Babel	Terlaksananya rekon data dan informasi pembangunan kehutanan Se-Prov. Kep. Babel	7 Kabupaten/Kota	1 Dokumen	184.780.000	APBD		1 Dokumen	184.780.000
Bimbingan Teknis Pemenuhan Kewajiban Bagi Pemegang Izin Pinjam Pakai	Terlaksananya bimtek terhadap IPPKH dan Aparatur Kehutanan	Jumlah peserta bimtek	40 orang	55.180.000	APBD		40 orang	55.180.000

Kawasan Hutan								
Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) Provinsi Tahun 2016	Terlaksanya penyusunan NSDH Provinsi	Dokumen	1 Dokumen	107.000.000	APBD		1 Dokumen	107.000.000
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan								
Pembinaan dan Pengendalian Pemenuhan Kewajiban rehabilitasi DAS bagi Pemegang IPPKH se- Prov. Kep. Babel	Terlaksannya Rehabilitasi DAS dalam Rangka Pemenuhan Kewajiban pemegang IPPKh	Pemegang IPPKh	6 Pemegang IPPKh	122.550.000	APBD		6 Pemegang IPPKh	122.550.000

Pengelolaan Perbenihan Tanaman Hutan di Prov. Kep. Babel	Terpeliharanya Sumber Benih dan Bibit Tanaman Hutan yang Bermutu baik dan bersertifikasi	Jumlah tegakan dan pengedar benih teridentifikasi	6 Tegakan Benih teridentifikasi dan 4 Pengada/Pengedar Benih/Bibit Tanaman Hutan	211.000.000	APBD		6 Tegakan Benih teridentifikasi dan 4 Pengada/Pengedar Benih/Bibit Tanaman Hutan	211.000.000
Rahabilitasi Lahan Kritis di dalam Kawasan dan Luar Kawasan Hutan	Terpelihara Areal Rehabilitasi Lahan Kritis dalam Kawasan Hutan dan Luar Kawasan Hutan	Jumlah Hektar	60 Ha	1.151.630.000	APBD		60 Ha	1.151.630.000
Penanaman dalam Rehabilitasi DAS pada IPPKH Pantai	Terlaksananya Rehabilitasi DAS pada IPPKh Pantai Lingkar Timur	Jumlah Hektar	70 Ha	685.500.000	APBD		70 Ha	685.500.000

Lingkar Timur di Prov. Kep. Bangka Belitung								
Puncak Aksi Penanaman Satu Miliar Pohon Tingkat Prov. Kep. Bangka Belitung -	Tercapainya Jumlah Penghijauan/pen anaman yang dilakukan provinsi	Jumlah Pohon	10 Juta Pohon	280.540.000	APBD		10 Juta Pohon	280.540.000
Pembinaan dan Pemeliharaan Hutan Kemasyarakata n (HKm) dan Hutan Desa (HD)	Terlaksananya Pembinaan dan Pemeliharaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Desa	Jumlah kelompok yang dibina	11 Kelompok HKm dan 1 HD	250.460.000	APBD		11 Kelompok HKm dan 1 HD	250.460.000
Total				11.342.628.00 0				15.529.415.07 1

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017 disusun berdasarkan Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013-2017. Dengan dukungan segenap sumber daya Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan instansi atau lembaga yang terkait, dan mengikuti peraturan yang telah ditetapkan, diharapkan program dan kegiatan dalam Renja 2017 dapat terlaksana untuk mewujudkan visi dan misi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dan visi dan misi Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Menjadi catatan penting terkait dengan program kegiatan dalam Renja 2017 adalah ada beberapa kegiatan yang wajib dilaksanakan, ada beberapa kegiatan yang belum memenuhi realisasi target yang direncanakan, serta kegiatan yang sudah memenuhi realisasi target kegiatan. Harapan kami juga realisasi pagu anggaran nanti sesuai dengan pagu indikatif yang telah ditetapkan, atau minimal sedikit berbeda, walaupun ada program kegiatan yang belum disetujui panitia anggaran eksekutif maupun legislatif, kami yakin kedua panitia tersebut akan menyeleksi dengan pertimbangan yang baik.

Pangkalpinang, Juli 2016
Kepala Kehutanan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Ir. Nazalyus, M.Si
NIP. 19590824 198603 1 009